

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT UPAYA PENANGANAN STUNTING (STUDI KASUS DI KECAMATAN LASIOLAT, KABUPATEN BELU)

Damianus Frederikus Leki, Willy Tri Hardianto, Agung Suprojo

Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Damianus Frederikus Leki

Abstract

In recent years, Indonesia's health sector has been plagued by problems such as infectious and non-communicable diseases, nutrition, maternal and child health, mental health services and various other problems. Until now, health problems that are still a concern are nutritional problems. Based on the results of the 2021 Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI) conducted by the Ministry of Health, the prevalence rate of stunting in Indonesia in 2021 was 24.4%. one of them is Lasiolat District. This sub-district is quite alarming with a drastic increase in the stunting problem, which in 2021 was only 9.1%, increasing to 25.9% in 2022. A regional policy strategy is needed to explain the national strategy. Namely the acceleration of stunting reduction which is regulated in Central Government Regulation No.72 and Belu Regent Regulation No.41 of 2022 concerning Acceleration of Stunting Reduction in Belu Regency. This study aims to describe and analyze how the implementation of stunting reduction policies in Belu Regency, especially Lasiolat District. This research was conducted using a qualitative descriptive method using the theory of policy implementation proposed by Edwar III. The results showed that the implementation of the stunting reduction policy in Lasiolat District showed that there were still several obstacles in its implementation, the policy standards still referred to the policy regulations.

Keywords ; Belu, policy implementation, Stunting

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini di bidang kesehatan sedang membayangi negara Indonesia yang sedang mengalami Permasalahan seperti penyakit menular dan tidak menular, gizi, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan jiwa dan berbagai masalah lainnya. Sampai saat ini masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian yaitu masalah gizi. Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Kasus stunting di Indonesia yang masih tinggi membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat lima besar dunia pada masalah stunting, sehingga Pemerintah Pusat melakukan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi dengan memprioritaskan kabupaten atau kota dalam penanganan stunting. Hal tersebut tentu masih tergolong tinggi, karena World Health Organization (WHO) memberikan toleransi kurang dari 20%.²(Wididiati, Nurcahyanto, and Marom 2022) Upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional percepatan Penurunan stunting yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Strategi nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga,

menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi. Walaupun pada tahun 2022 kabupaten Belu mengalami penurunan masalah stunting namun ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan masalah stunting, salah satunya adalah Kecamatan Lasiolat. Kecamatan ini cukup perihatin dengan kenaikan masalah stuntingnya cukup drastis, yang dimana pada tahun 2021 hanya 9,1%

naik menjadi 25,9% pada tahun 2022. Strategi kebijakan Perda di perlukan untuk menjelaskan strategi Nasional. Yaitu percepatan penurunan stunting yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Pusat No.72 dan Peraturan Bupati Belu No.41 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah Kabupaten Belu. Dengan melibatkan pihak – pihak pemerintahan seperti, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kabupaten Belu, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Belu, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, perwakilan BPOM Kabupaten Belu, perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belu, perwakilan BP4D Kabupaten Belu

Tabel 1. Jumlah kasus *Stunting* di setiap Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu pada Tahun 2021-2022

No	Nama Kecamatan	Tahun	
		2021	2022
1.	Kecamatan Raimanuk	24,6%	18,4%
2.	Lamaknen	30,7%	25,7%
3.	Lamaknen Selatan	21,5%	25,1%
4.	Tasifeto Timur	21,2%	12,9%
5.	Nanaet Duabesi	21,9%	21,5%
6.	Atambua Selatan	17,5%	9,2%
7.	Kakuluk Mesak	16,4%	19%
8.	Atambua Barat	11,1%	9,1%
9.	Kota Atambua	9,2%	8,3%
10.	Raihat	11,6%	8,8%
11.	Lasiolat	9,1%	25,9%
12.	Tasi Feto Barat	10,8%	6%

Sumber : Data Dikelola, 2023

Dilihat dari kasus stunting PerKecamatan Kabupaten Belu, Kecamatan Lasiolat memiliki tingkat prosentasi 9,1% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan prosentasi 25,9%. Permasalahan ini menunjukan kualitas penduduk Kabupaten Belu di bidang kesehatan belum terpenuhi secara baik dan perlu adanya perhatian kusus dari Pemerintah Kabupaten Belu sendiri terkait penanganan dan di butuhkan cara yang tepat guna terpenuhinya kualitas penduduk bidang kesehatan di Kabupaten Belu, terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masalah gisi stunting bukan hanya permasalahan sektor kesehatan saja tetapi merupakan masalah multisektor.

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah noun: policy; plural noun: policies ; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual.(kata benda: kebijakan;kata benda jamak: kebijakan ; kursus atau prinsip tindakan yang diadopsi atau diusulkan oleh pemerintah, partai, bisnis, atau individu).

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan masalah kebijakan. Konsep kebijakan ini memiliki implikasi yaitu ;

- 1.) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik
- 2.) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri , tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.
- 3.) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh Pemerintah.
- 4.) Kebijakan dapat bersifat positif dan negative.
- 5.) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan Publik

Kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan (Wahab 1991), pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Kebijakan publik ialah hasil dari proses pengaturan pemerintahan,dimana hasil dari pengaturan ini bertujuan untuk mengatur serta menghindari dari semua permasalahan ataupun gerakan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.

Model – Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.

Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi:

- 1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
- 2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
- 3) *xtend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas
- 4) *site of decission making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
- 5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
- (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Menurut Edwards George III. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan ini dimana implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut Edward George III dalam bukunya Solichin Abdul Wahab faktor atau indikator tersebut adalah;

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/Sikap

4. Struktur Organisasi

Pemerintah Daerah

Konsep pemerintahan daerah merupakan penerjemahan konsep sistem pemerintahan local government yang pada intinya memiliki tiga pengertian, yaitu: pertama pemerintah lokal, kedua berarti kegiatan yang dilakukan pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Dalam ketiga pengertian pemerintah daerah memiliki beberapa pengertian. Pada pengertian pertama, Pemerintah lokal lebih menunjuk kepada Organisasi/Badan/Lembaga yang berfungsi menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah menitikberatkan kepada organisasi yang memimpin dan pelaksanaan kegiatan suatu pemerintahan daerah. Pengertian tersebut dalam konteks pemerintahan di Indonesia lebih menunjuk kepada Kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan eksekutif. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Kedua lembaga tersebut lebih dimaknai sebagai Pemerintah Daerah (local government atau local authority)

Pengertian *Stunting*

Definisi *stunting* sendiri mengalami perubahan, menurut WHO (2015), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Menurut Gladys A. dan Sandra F. (2018) “*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidak seimbangan gizi. Lebih jauh Jusuf Kalla (2018:10) menjelaskan bahwa “ *Stunting* atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *Stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurannya. Di Indonesia *Stunting* masih menjadi masalah gizi yang belum terselesaikan, yang akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam mengatur penyelenggaraan upaya peningkatan asupan gizi masyarakat. Maksud dari perbaikan gizi yaitu untuk memperbaiki mutu gizi setiap individu.

Dampak *Stunting*

Dampak *stunting* tidak hanya terlihat pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan mental dan sosial anak. Penelitian oleh Mardiyati dan Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tumbuh normal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan dengan analisis dan interpretasi teks serta hasil wawancara untuk menemukan makna dari fenomena yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah terkait penanganan *stunting* di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, dengan fokus pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Metode ini juga

memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara rinci konteks sosial dan budaya yang memengaruhi upaya penanganan stunting di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Perbu No.41 tentang percepatan penurunan *stunting* di kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu

Percepatan penurunan stunting yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Pusat No.72 dan Peraturan Bupati Belu No.41 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Kabupaten Belu. Dengan melibatkan pihak – pihak pemerintahan seperti, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kabupaten Belu, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Belu, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, perwakilan BPOM Kabupaten Belu, perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belu, perwakilan BP4D Kabupaten Belu.

Kasus *stunting* PerKecamatan Kabupaten Belu, Kecamatan Lasiolat memiliki tingkat presentasi 9,1% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan prosentasi 25,9%. Permasalahan ini menunjukan kualitas penduduk Kabupaten Belu di bidang kesehatan belum terpenuhi secara baik dan perlu adanya perhatian kusus dari Pemerintah Kabupaten Belu sendiri terkait penanganan dan di butuhkan cara yang tepat guna terpenuhinya kualitas penduduk bidang kesehatan di Kabupaten Belu, terlaksana dengan baik.

Hal ini dikarenakan masalah gisi stunting bukan hanya permasalahan sektor kesehatan saja tetapi merupakan masalah multisektor.

Gambar 1 Data *Stunting* Tahun 2021 Kecamatan Lasiolat

DATA STATUS GIZI TAHUN 2021 KECAMATAN LASIOLAT									
No	Desa/Kelurahan	BB/U				BB/TB			Stunting
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Lebih	
1.	LASIOLAT	1	25	54	1	1	7	1	15
2.	MANEIKUN	5	24	60	1	0	11	1	30
3.	FATULOTU	9	54	122	0	4	18	0	49
4.	LAKANMAU	4	27	94	0	1	11	1	28
5.	RAIULUN	7	30	60	0	2	4	0	32
6.	DUALASI	9	36	68	0	0	12	0	33
7.	BAUDAOK	2	12	38	0	0	7	1	5
JUMLAH		37	208	496	2	8	70	4	192

Sumber; Data Sekunder 2024

Gambar 2 Data *Stunting* Tahun 2022 Kecamatan Lasiolat

DATA STUNTING TAHUN 2022 KECAMATAN LASIOLAT									
No	Desa/Kelurahan	BB/U			BB/TB				Stunting
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	
1.	LASIOAT	1	26	44	0	4	2	0	15
2.	MANEIKUN	6	20	68	1	6	4	0	27
3.	FATULOTU	5	56	126	2	12	3	0	48
4.	LAKANMAU	3	28	86	1	7	11	1	34
5.	RAIULUN	8	25	57	0	6	0	0	44
6.	DUALASI	6	28	80	0	7	2	0	30
7.	BAUDAOK	0	17	41	0	5	1	0	7
JUMLAH		29	200	502	4	47	23	1	205

Sumber; Data Sekunder 2024

Dari dua gambar tabel di atas dapat di lihat adanya perubahan angka stunting di Kecamatan Lasiolat yang di mana pada tahun 2021 masi 192 anak dan naik menjadi 205 anak pada tahun 2022 yang menyandang stunting hal ini menggambarkan Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan stunting di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu masih perlu diperhatikan karena tingkat stunting di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan perlu adayan interfensi pemerintah secara merata khususnya di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Hasil wawancara dengan para informan Terkait dua aspek yang di sampaikan sebagai berikut:

1. Intervensi Pemerintah Kecamatan Lasioat Dalam Upaya Penanganan *Stunting*.

Dalam upaya Implementasi kebijakan Perbu No.41 tentang percepatan penurunan stunting di kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Pemerintah melakukan instrupsi secara langsung kepada masyarakat melalui posiyandu yang isinya pembinaan dan penyuluhan terkait pentignya stunting. Proses penyampaian informasi terkait program penurunan dan penanggulangan stunting di sampaikan oleh pihak kesehatan puskesmas Aululik yang disampaikan secara jelas kepada Masyarakat dan masyarakat pun dapat menerima dengan dilakukannya proses sosialisasi kepada orang tua yang anaknya menyandang *stunting*.

2. Peningkatan Pendidikan Kesehatan

Dalam upaya Implementasi kebijakan Perbu No.41 tentang percepatan penurunan stunting di kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu dalam Sumber daya manusia pada pemerintahan Kecamatan Lasiolat sudah optimal karena mayoritas staf berpendidikan sarjana dan juga sumber daya di bidang kesehatan cukup memadai. Masalahnya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi sosial masyarakat.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kebijakan Perbu No.41 Terkait Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Faktor Pendukung

Masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah Kecamatan Lasiolat melalui pemberian makanan tambahan (PMT) hal tersebut di tandai dengan pemberian pemberian makanan berupa tambahan biskuit pada balita kurang gizi, kegiatan pemberian makanan bayi dan anak (PMBA). Disisi lain pemerintah juga melakukan pemantauan balita resiko stunting, sosialisasi bayi dan ibu balita, sosialisasi kadar gizi bagi ibu balita.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat penurunan stunting di Kecamatan Lasiolat adalah pernikahan dini, lapangan kerja, dan faktor iklim yang tidak menentu sehingga menyebabkan kelaparan, sumber daya manusia yang rendah seperti pendidikan dan ekonomi yang tidak mampu, juga menjadi penghambat dalam penanganan penurunan stunting. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan, implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, koordinasi yang kurang efektif antar instansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan stunting di Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu masih perlu diperhatikan karena tingkat stunting di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini perlu adanya penyuluhan bagi orang tua yang anaknya terkena stunting, penanganan pemberian gizi dan lain lain adalah Upaya pemerintah agar mengurangi penambahan stunting dan juga Pendidikan kesadaran Masyarakat hidup sehat. Perlu adanya pendataan yang dilakukan secara terpadu, sehingga penderita stunting dapat di kontrol secara langsung oleh pihak pemerintah, pencegahan stunting juga dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat di Puskesmas dan Posyandu lewat pemberian PMT kepada balita maupun ibu hamil. Namun Implementasi kebijakan Perbu No.41 tentang percepatan penurunan stunting di kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu memiliki kendala terkait sumber daya pada masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh minimnya pendidikan, pernikahan di usia dini, iklim yang tidak menentu, mata pecaharian yang tidak tetap serta krisis air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Almatsier S. 2001. Prinsip dasar ilmu gizi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Aryastami, N.K. 2015. Pertumbuhan usia dini menentukan pertumbuhan usia pra-ubertas (*studi longitudinal IFLS1993-1997-2000*) *Longitudinal study, secondary data analisis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aryastmai N.K, Tarigan I. 2017. Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi *stunting* di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*; 45(4):233-240
- Atikah Rahayu, SKM, MPH; Fahrini Yulidasari, SKM, MPH; Andini Octaviana Putri, SKM, M.Kes; dan Lia Anggraini, SKM. 2018. *Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya*. CV Mine Yogyakarta.
- Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela. ISSN 2088 - 270 X.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, faktor risiko dan pencegahannya. *J Agromedicine*, 5(1), 540–545. <https://doi.org/10.1201/9781439810590-c34>

Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, faktor risiko dan pencegahannya. *J Agromedicine*, 5(1), 540–545. <https://doi.org/10.1201/9781439810590-c34>

World Health Organization (WHO). www.who.int.

Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor – faktor yang mempengaruhi stunting pada balita di kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704>

Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor – faktor yang mempengaruhi stunting pada balita di kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704>